

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya pembangunan disuatu negara dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya demikian halnya dengan indonesia. Dalam undang- undang dasar 1945 jelas disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional ialah untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa,serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 yang membahas tentang desa bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sekitar berdasar pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Desa dalam pelaksanaan otonomi daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional dan merupakan unsur pokok dalam sistem pembangunan Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

juga menegaskan bahwa dengan adanya otonomi desa diharapkan desa akan menjadi mandiri. Kemandirian sebuah desa dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni keuangan desa, desentralisasi kewenangan, kelembagaan desa, kelembagaan masyarakat, dan kualitas SDM (sumber daya manusia) dalam hal ini adalah aparatur perangkat desa. (Yayat Rukayat, 2020).

Undang – undang nomor 06 tahun 2014 juga mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, dalam pemerintahan indonesia di canangkan berbagai program diantaranya seperti program inpres desa tertinggal, program pembangunan infra struktrur pedesaan, program alokasi dana desa, program PNPM dan sebagainya. Semua program khusus ini bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan di daerah pedesaan. (Poma & Wiryawan, 2021)

Masyarakat desa seharusnya berada pada posisi penting dalam pembangunan desa, namun dalam prakteknya masyarakat cenderung

diabaikan. Hal ini menyebabkan program-program yang dirancang justru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini dijelaskan oleh (Muluk, 2010) kenyataan dilapangan desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak sejalan dengan tujuan. Hal ini dikarenakan berbagai persoalan antara lain: (a) adanya dominasi oleh elit lokal; (b) lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi; (c) lemahnya organisasi kemasyarakatan lokal; dan (d) rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi.

Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya proses pembangunan harus mengikutsertakan masyarakat desa, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam pembangunan merupakan pemberdayaan potensi masyarakat melalui musyawarah bertujuan peningkatan penyampaian aspirasi masyarakat desa berupa keinginan dan kebutuhan masyarakat desa sehingga pembangunan desa ditujukan kepada masyarakat desa sehingga mampu mengelola segala potensi dan sumber daya yang dimiliki desa. (Samsu Rizal, Nurul Zuriah, 2019)

Dalam mencapai good governance, peran para stakeholder dari masyarakat, pemerintah maupun swasta sangatlah penting dalam perumusan pembangunan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Bagaimana pun keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan sangat penting dalam bentuk partisipasinya pada pembangunan desa. Disinilah Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) berperan sebagai ruang publik karena dengan partisipasi masyarakat maka perencanaan

pembangunan dapat lebih aspiratif dan berdaya guna sesuai dengan permasalahan dalam masyarakat dan kebutuhan yang urgen harus dipenuhi.

Partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pendapat atau teori tersebut secara rasional dapat diterima, karena secara ideal tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu masyarakat harus ikut dilibatkan didalamnya. (Angelius Henry Sigalingging & Warjio, 2014).

Tercapainya keberhasilan pembangunan tersebut maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya serta mereka juga yang nantinya akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Pendekatan top-down dan partisipatif dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 terwujud dalam bentuk rangkaian musrenbang yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat desa (musrenbangdes), kecamatan (musrenbang kecamatan) dan kabupaten (musrenbang kabupaten). Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penyusunan sistem perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap tahunnya.

Adanya partisipasi secara aktif, masyarakat bisa menyalurkan aspirasi mereka dan ikut andil dalam menghasilkan dokumen perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian partisipasi masyarakat terhadap pembangunan menjadi

bentuk sumbangsih pembangunan bagi desa dan merupakan wahana publik (public event) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah .

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa bukan hanya ditentukan oleh adanya peranan pemerintah saja melainkan juga bergantung dari bagaimana peran serta atau partisipasi masyarakat. Sasaran pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam arti masyarakat diharuskan berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan.

Dengan demikian masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan usulan proyek pembangunan, terutama didalam menentukan proyek-proyek yang lebih diprioritaskan dilaksanakan didesa agar supaya akan tercipta bahwa benar-benar pembangunan adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Mutlak diperlukan sesuai dengan hakekat pembangunan desa atau kelurahan yang pada prinsipnya dilakukan dengan bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan pemerintah sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik.(Tesyalom Sembel, Ronny Gosal, 2017).

Kalianget barat merupakan satu dari tujuh desa yang berada di kecamatan kalianget, dalam hal percepatan dan pemerataan pembangunan dapat dikatakan pemerintah desa sudah cukup aktif melibatkan masyarakat dalam pembangunan, namun karena pandemi covid 19 semua agenda kegiatan seperti musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes) dilakukan secara terbatas, akan tetapi pada proses pelaksanaan pembangunan terdapat fenomena menarik yang mana menurut keterangan dari aparat desa kalianget barat bahwa ada kecenderungan partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan pembangunan masih belum maksimal, hanya segelintir masyarakat saja yang mau berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan itu pun karena mereka dibayar oleh pemerintah desa bukan karena didasarkan atas kesukarelaan hati dari para warga sehingga bisa dibilang masyarakat masih belum memiliki kesadaran penuh untuk kemajuan pembangunan wilayahnya, tidak hanya itu di tahun 2022 post untuk anggaran pembangunan di desa kalianget barat mengalami perubahan yang mana dana pembangunan kurangi dan dialihkan kepada bantuan untuk masyarakat yang terdampak covid 19 seperti BLT DD (bantuan langsung tunai dana desa), bantuan sandang, pangan, dan hewani yang sifatnya kelompok.

Tabel 1.1
Realisasi APBDES Kalianget Barat Tahun 2021

No.	Rincian kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Lebih (kurang)
1	Pendataan SDGS	101.116.750.00	101.116.000.00	750.00
2	Musdes regular	3.315.000.00	3.315.000.00	0.00
3	Musdes non regular	3.365.000.00	3.365.000.00	0.00
4	Musdes RKPD desa	5.750.000.000	5.750.000.00	0.00
5	Musdes APBDES, musdes APBDES perubahan	12.695.000.00	12.695.000.00	0.00
6	Pengembangan SID desa	65.198.000.00	64.824.000.00	373.750.00
7	Penyelenggaraan PAUD,TK,TPA,Madrasah	39.600.000.00	39.600.000.00	0.00
8	Bantuan siswa miskin/berprestasi	23.080.000.00	23.080.000.00	0.00
9	Penyelenggaraan posyandu	79.180.000.00	79.180.000.00	0.00
10	Penyelenggaraan desa siaga covid 19	36.430.000.00	36.430.000.00	0.00
11	Rehap jalan aspal dusun kebun kelapa RT 02 RW 03	20.311.422.00	20.311.000.00	422..00
12	Paving dusun kebun kelapa RT 01 RW 03	63.157.000.00	63.430.000.00	24.000.00
13	Paving dusun lojikantang RT 02 RW 01	37.537.000.00	37.513.000.00	24.000.00
14	Paving dusun asem nunggal RT 05 RW 02	37.275.000.00	37.5258.000.00	17.000.00
15	Paving dan PTP dusun asem nunggal RT 05 RW 02	74.876.000.00	74.876.000.00	0.00
16	RTLH	15.000.000.00	15.000.000.00	0.00
17	Jamban umum	20.000.000.00	20.000.000.00	0.00
18	Normalisasi saluran drainase dusun lojikantang RT 09 RW 01	29.385.000.00	29.395.000.00	10.000.00
19	Pengadaan PPKM mikro	80.870.000.00	80.517.000.00	452.124.00
20	Pembinaan PKK	12.800.000.00	12.800.000.00	0.00
21	Peningkatan kapasitas aparatur desa	27.000.000.00	27.000.000.00	0.00
22	Belanja tak terduga	6.435.250.00	6.435.250.00	250.00
23	Keadaan darurat	6.933.000.00	6.933.000.00	0.00
24	Keadaan mendesak (BLT DD + tambahan BLT DD)	450.000.000.00	450.000.000.00	0.00
	Total belanja dana desa T.A 2021	1.251.479.422.00	1.250.577.126.00	902.296.00

Sumber : *Desa Kalianget Barat, 2022*

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa kaliangget barat kecamatan kaliangget kabupaten sumenep “

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa kaliangget barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa kaliangget barat.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan dan menjadi sumber rujukan bagi penelitian serupa dimasa yang akan datang

b. Praktis

Dalam praktis bermanfaat sebagai berikut:

1) Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa kaliangget barat kecamatan kaliangget kabupaten sumenep dan menambah pengalaman serta relasi karena terjun secara langsung kelapangan.

2) Bagi pembaca

Memberikan pemahaman ilmu lebih jelas dan terperinci mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

c. Bagi pemerintah desa

Bisa menjadi bahan masukan dan evaluasi terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberi masukan dalam pembuatan kebijakan dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dan supaya lebih terarah sesuai dengan focus yang ingin dicapai maka penulis membuat sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada Bab II ini penulis akan membahas mengenai kajian empiris atau penelitian terdahulu dan grand theory sehingga dapat mendukung penelitian yang di lakukan

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Pada BAB III ini berisi tentang fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan keabsahan data yang telah dikumpulkan

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran secara umum dari objek penelitian seperti: sejarah desa, visi, misi, struktur organisasi, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, dan potensi desa.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil terkait dengan penelitian yang berupa data yang diperoleh selama dilapangan serta data-data tersebut nantinya disandingkan sdengan teori sebagai bahan analisa.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran bagi objek penelitian.

